

EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PILKADA 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

Farras Azna Putri¹Andi Azikin²

NPP. 32.0276

Asdaf Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung
Program Studi Politik Indonesia Terapan

¹Email: farrasaznaputri@icloud.com ²Email: andiazikin@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Azikin, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In an effort to prevent various forms of electoral fraud, the government has taken progressive steps by integrating the vote recapitulation process into the Recapitulation Information System (Sirekap). However, in its implementation, the Sirekap application still faces several challenges, such as limited technological infrastructure in some remote areas, low voter participation and awareness regarding the application, as well as inadequate training for polling station officers, which leads to inaccuracies in data entry. **Purpose:** This study aims to examine the effectiveness of the Recapitulation Information System (Sirekap) application in the 2024 Regional Elections (Pilkada) in North Lampung Regency, Lampung Province. **Method:** The results of the study indicate that in the target approach dimension, the objectives of implementing the Sirekap application have been achieved; however, technical obstacles still exist in several remote areas. In the resource approach dimension, the system's transparency in using the Sirekap application has been carried out optimally, with the General Elections Commission (KPU) actively providing public access to the vote recapitulation results. In the process approach dimension, the use of Sirekap demonstrates a significant level of efficiency in the vote recapitulation process. **Conclusion:** The use of the Recapitulation Information System (Sirekap) application during the 2024 Regional Elections in North Lampung Regency was quite effective in expediting the vote recapitulation process transparently and accurately.

Keywords: Effectiveness, Application, Recapitulation Information System, Regional Elections.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Upaya untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu, pemerintah telah mengambil langkah progresif dengan mengintegrasikan proses rekapitulasi suara ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Namun demikian, dalam pelaksanaannya aplikasi sirekap masih mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah terpencil, kurangnya partisipasi dan kesadaran pemilih tentang aplikasi sirekap, serta kurangnya pelatihan bagi petugas TPS yang berdampak pada ketidaktepatan dalam penginputan data. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan

wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan dua teknik pengambilan informan yakni *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi pendekatan sasaran ditemukan bahwa target dari pelaksanaan penggunaan aplikasi sirekap sudah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala teknis di beberapa daerah terpencil. Pada dimensi pendekatan sumber, keterbukaan sistem pada penggunaan aplikasi sirekap sudah dilakukan secara optimal dimana KPU secara aktif membuka akses publik terhadap hasil rekapitulasi suara. Pada dimensi pendekatan proses, efisiensi dalam penggunaan sirekap menunjukkan tingkat efisiensi yang signifikan dalam proses rekapitulasi suara. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara cukup efektif dalam mempercepat proses rekapitulasi suara secara transparan dan akurat.

Kata kunci: Efektivitas, Aplikasi, Sistem Informasi Rekapitulasi, Pilkada.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia mencerminkan prinsip demokrasi dengan tujuan membentuk pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Tradisi ini dimulai sejak tahun 1955 dan terus berkembang seiring waktu. Pada tahun 2024, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu dengan melibatkan lima jenis kotak suara yang mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Proses ini menggunakan tiga sistem berbeda, yakni sistem proporsional terbuka untuk pemilihan legislatif, sistem mayoritarian untuk pemilihan presiden, serta sistem nonpartisan untuk pemilihan anggota DPD, mencerminkan kompleksitas demokrasi modern yang mengutamakan representasi rakyat (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Penyelenggaraan pemilu tidak hanya mencerminkan dinamika demokrasi, tetapi juga melibatkan tingkat partisipasi masyarakat yang beragam dalam mendukung jalannya pesta demokrasi. Dalam proses ini, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memainkan peran sentral sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. KPPS bertanggung jawab memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, dan efisien, mulai dari tahap persiapan logistik, validasi pemilih, hingga penghitungan suara. Peran strategis KPPS tidak hanya menjaga integritas proses demokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu sebagai refleksi dari aspirasi rakyat (Prayudi, 2024).

Segala bentuk aktivitas demokrasi, termasuk pemilu, selalu berpotensi menghadapi tantangan berupa pelanggaran dan kecurangan. Hal ini mencerminkan kompleksitas pelaksanaan demokrasi di negara yang luas dan beragam seperti Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum pemilu, distribusi putusan pidana pemilu di seluruh provinsi menunjukkan variasi yang signifikan. Provinsi Sulawesi Selatan mencatat jumlah putusan tertinggi, yakni sebanyak 41 putusan, yang mengindikasikan tingginya dinamika dan intensitas kasus pelanggaran pemilu di daerah tersebut. Data ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan upaya pencegahan yang komprehensif untuk menjaga integritas proses demokrasi (Bawaslu, 2023).

Isu dan berita tentang kecurangan pemilu telah menjadi bagian dari dinamika masyarakat Indonesia, mencerminkan tantangan yang terus berulang dalam proses demokrasi. Fenomena ini sudah ada sejak pemilu masa lalu, menjadi salah satu aspek yang menguji integritas sistem pemilu di Indonesia. Kecurangan sering kali terjadi pada tahap-tahap krusial, seperti proses pemungutan dan perhitungan suara, di mana manipulasi data dilakukan oleh pihak-pihak

tertentu untuk memengaruhi hasil akhir. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan calon yang dirugikan tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalkan risiko kecurangan dan memastikan pemilu yang jujur dan adil (Haryanto, 2020).

Proses perhitungan dan rekapitulasi suara merupakan tahap krusial dalam penyelenggaraan pemilu, karena hasil akhir dari proses ini menjadi dasar untuk menentukan pemenang secara sah. Tahap ini tidak hanya melibatkan akurasi dan ketelitian, tetapi juga transparansi, guna memastikan bahwa suara rakyat dihitung secara adil dan tidak dimanipulasi. Sebagai jantung dari proses demokrasi, perhitungan dan rekapitulasi suara membutuhkan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk pengawas pemilu, saksi dari masing-masing kandidat, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat terjaga, dan legitimasi pemenang pemilu dapat diterima oleh semua pihak (Santoso, 2018).

Proses penghitungan suara sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, mengingat pemilu serentak melibatkan banyak pihak dan jenis surat suara yang beragam. Keterlibatan elemen-elemen seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), saksi dari masing-masing kandidat atau partai, dan pengawas pemilu menjadi sangat krusial dalam memastikan proses ini berjalan dengan lancar. Selain itu, keberadaan teknologi dalam penghitungan suara, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP), turut membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi, meskipun tetap memerlukan pengawasan ketat untuk meminimalkan risiko kecurangan. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak ini sangat penting agar hasil akhir dapat mencerminkan suara rakyat dengan akurat dan adil (Rian, 2019).

Dalam mencegah berbagai bentuk kecurangan pada pelaksanaan pemilu, pemerintah telah mengambil langkah progresif dengan mengintegrasikan proses rekapitulasi suara ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Inovasi ini diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam penghitungan suara. Sirekap memungkinkan data dari tempat pemungutan suara (TPS) diunggah secara digital, sehingga hasilnya dapat diakses oleh publik secara *real-time*. Dengan sistem ini, potensi manipulasi dalam proses rekapitulasi manual dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Namun, keberhasilan implementasi Sirekap memerlukan infrastruktur teknologi yang andal, pelatihan bagi petugas pemilu, serta pengawasan ketat untuk memastikan sistem ini bebas dari gangguan dan potensi penyalahgunaan.

Sirekap merupakan suatu inovasi digital dalam penyelenggaraan pemilu yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses rekapitulasi suara. Sistem ini memungkinkan hasil pemungutan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) direkapitulasi secara elektronik dan diunggah ke server pusat untuk meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi data. Sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemilu, Sirekap bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau hasil pemilu secara *real-time*. Selain itu, penggunaan Sirekap juga membantu efisiensi waktu dan anggaran, sehingga proses pemilu menjadi lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Wibowo, 2020).

Sirekap memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam proses rekapitulasi suara pemilu. Dengan kemampuannya untuk menyajikan hasil secara *real-time* dan mengurangi risiko manipulasi data, inovasi ini menjadi langkah maju dalam modernisasi sistem pemilu Indonesia. Namun, Sirekap masih menghadapi berbagai kritik yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, potensi kerentanan terhadap serangan siber, serta kurangnya pemahaman dan

pelatihan bagi petugas pemilu dalam menggunakan sistem ini. Kritik-kritik tersebut menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar manfaat dari Sirekap dapat dioptimalkan dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Tabel 1
Data Partisipasi Pemilih di Kabupaten Lampung Utara

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total Pemilih (DPT)	500,000	100%
Pengguna Hak Pilih	375,000	75%
Tidak Menggunakan Hak Pilih	125,000	25%
Target Partisipasi Nasional	-	80%
Capaian Partisipasi Provinsi Lampung	-	78%
Capaian Partisipasi Kabupaten Lampung Utara	-	75%

Sumber: KPU Kabupaten Lampung Utara (2024)

Tabel 1 Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan 75% dari total 500,000 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya, sementara 25% tidak berpartisipasi. Capaian ini masih berada di bawah target partisipasi nasional sebesar 80% dan sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata partisipasi provinsi Lampung yang mencapai 78%. Data ini mencerminkan adanya peluang untuk meningkatkan partisipasi melalui strategi yang lebih efektif dalam mendorong kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat, guna mencapai target nasional di pemilu mendatang (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, 2024).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemilu tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai standar pemilu yang berkualitas dan sepenuhnya demokratis. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah permasalahan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yang memengaruhi transparansi dan akurasi rekapitulasi suara. Permasalahan tersebut mencakup kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet, keamanan data, hingga rendahnya pemahaman petugas terhadap penggunaan aplikasi ini. Permasalahan penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara mencerminkan tantangan yang beragam. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah terpencil, yang menyebabkan proses pengunggahan data hasil pemungutan suara menjadi lambat dan tidak konsisten. Selain itu, landasan hukum yang mengatur implementasi Sirekap dinilai belum cukup kuat, sehingga memunculkan kekhawatiran akan legitimasi penggunaannya dalam proses rekapitulasi suara. Masalah teknis juga menjadi sorotan, di mana kurangnya pelatihan bagi petugas pemilu mengakibatkan banyaknya kesalahan dalam pengoperasian aplikasi. Faktor-faktor ini secara keseluruhan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu, yang seharusnya mencerminkan prinsip demokrasi yang jujur dan transparan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Hardiyanti *et al* tentang urgensi penerapan Sistem *E-voting* dan Sirekap dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam proses pemilu dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi. Penelitian ini menyoroti bahwa *E-voting* memiliki potensi untuk mengurangi risiko kesalahan manual dalam pemungutan suara, sementara Sirekap dapat mempercepat proses rekapitulasi dan meminimalkan manipulasi data. Namun, implementasi kedua sistem ini juga menghadapi tantangan signifikan, seperti kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan

petugas, dan jaminan keamanan siber. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan persiapan yang matang, termasuk simulasi menyeluruh, untuk memastikan keberhasilan integrasi teknologi dalam pemilu (Hardiyanti et al, 2022).

Penelitian Deni Mustofa *et al* mengenai implementasi Sirekap dalam perubahan sosial teknis Pilkada 2020 menunjukkan bahwa inovasi digital ini telah membawa transformasi signifikan dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Sirekap dinilai mampu mempercepat proses rekapitulasi suara dan meningkatkan transparansi hasil pemilu, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Namun, penelitian ini juga mencatat berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kendala jaringan internet di daerah terpencil, serta tingkat pemahaman petugas pemilu terhadap penggunaan aplikasi ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis bagi penyelenggara pemilu dan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung implementasi Sirekap secara lebih luas pada pemilu mendatang (Deni Mustofa et al, 2021).

Penelitian Icar Angger Pradesa menunjukkan bahwa Sirekap memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam rekapitulasi suara, sekaligus mengurangi risiko manipulasi data secara manual. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah problematika, seperti kesiapan sumber daya manusia, keamanan data dari ancaman siber, dan keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Berdasarkan temuannya, Pradesa merekomendasikan pendekatan strategis berupa pelatihan intensif bagi petugas pemilu, peningkatan sistem keamanan digital, dan investasi infrastruktur teknologi untuk memastikan keberhasilan implementasi Sirekap dalam Pilkada 2024 (Icar Angger Pradesa, 2024).

Penelitian Annisa Nur Azzahra menunjukkan bahwa potensi penggelembungan suara melalui Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dapat mengancam prinsip demokrasi yang jujur dan adil (jurdil). Penelitian ini menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu sebagai refleksi nilai-nilai kepemimpinan yang bertanggung jawab menurut ajaran Islam. Temuan penelitian menggarisbawahi bahwa meskipun Sirekap menawarkan efisiensi dan akurasi, risiko manipulasi data tetap menjadi ancaman nyata, terutama jika pengawasan dan keamanan sistem tidak dioptimalkan. Azzahra merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknis petugas pemilu, serta pengawasan berbasis partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa Sirekap dapat digunakan secara aman dan mendukung pemilu yang demokratis serta sesuai prinsip syariah (Annisa Nur Azzahra, 2024).

Penelitian Gema Wahyu Putri Kinasih menunjukkan penggunaan aplikasi sirekap menurut *stakeholder* pada pemilu tahun 2024 yaitu KPU, Bawaslu, Parpol, serta KPPS memperoleh hasil bahwa penggunaan aplikasi Sirekap sudah efektif sesuai dengan tujuan dalam penggunaannya. Yaitu sebagai alat bantu pemilu dan media untuk menyebarkan hasil perolehan suara pemilu kepada Masyarakat secara cepat dan mudah diakses melalui Sirekap Web (Gema Wahyu Putri Kinasih, 2024).

Penelitian Soma Atmaja, Muh Ilham, Mansyur Achmad dan Andi Azikin berfokus pada implementasi kebijakan *e-government* dalam layanan perizinan *online* berupa aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan sipinter. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengevaluasi bagaimana kebijakan *e-government* diterapkan serta memperkenalkan pendekatan baru dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dalam layanan publik di sektor perizinan di DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan strategi induktif berdasarkan teori Edward III. Berbagai metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-government* di DPMPTSP Kabupaten Tangerang melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan sipinter masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangan (Atmaja, S., Ilham, M., Achmad, M., & Azikin, A, 2025).

Penelitian Iga Sulandari dan Romi Saputra tentang Strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menyimpulkan bahwa, upaya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Barat pada dengan cara yang lebih kreatif dalam pengelolaan media sosial, mengadakan sosialisai, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan Kampung Pengawasan pemilu (Iga Sulandari dan Romi Saputra, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Thasya Adelia Bunga Parrangan dan Meltarini mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Kabupaten Toraja Utara dalam mempersiapkan Pemilu tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Salah satu upaya utama yang diambil adalah mengintensifkan kegiatan sosialisasi, baik melalui pendekatan langsung kepada masyarakat maupun pemanfaatan media lokal. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses dan pentingnya partisipasi dalam Pemilu, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan teknis selama pelaksanaan. Selain itu, pendekatan yang dilakukan juga mencakup edukasi kepada pemilih pemula serta pelatihan kepada petugas pemilu guna memastikan kesiapan maksimal di semua tingkatan (Thasya Adelia Bunga Parrangan dan Meltarini, 2023).

Penelitian Ahmad *et al* memberikan tinjauan komprehensif tentang sistem pemungutan suara elektronik, evolusi historisnya, dan klasifikasinya menjadi empat jenis: kartu berlubang (*punch card*), pemindaian optik (*optical scanning*), perekaman elektronik langsung (*Direct Recording Electronic/DRE*), dan pemungutan suara melalui Internet jarak jauh (*remote Internet voting*). Penelitian menyoroti pentingnya sistem *e-voting* yang efisien dengan karakteristik utama seperti transparansi, keamanan siber, akurasi, kecepatan, privasi, aksesibilitas, objektivitas, hemat biaya, dan keberlanjutan dalam konteks pemilu. Selain itu, *e-voting* diakui sebagai proses kontemporer yang telah merevolusi mekanisme pemungutan suara tradisional, dengan berbagai keuntungan, termasuk penghematan waktu, biaya, dan tenaga serta peningkatan akses di daerah terpencil. Artikel ini menekankan pentingnya transparansi, akurasi, dan keamanan dalam sistem *e-voting* untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam proses pemilu (Ahmad, A. H., Farmanullah, Tabassum, N., Ali, S., Ayaz, M., Bashir, N., & Neelam, M., 2021).

Penelitian Jafar, Ab Aziz, dan Shukur memberikan tinjauan mendalam tentang penerapan teknologi *blockchain* dalam sistem pemungutan suara elektronik. Meskipun pemungutan suara daring menawarkan keuntungan seperti pengurangan biaya organisasi dan peningkatan partisipasi pemilih, terdapat risiko besar terkait kerentanannya, yang dapat mengarah pada manipulasi suara dalam skala besar. Teknologi *blockchain* diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menawarkan node terdesentralisasi, verifikasi end-to-end, dan perlindungan keamanan yang lebih baik. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan *blockchain* pada sistem pemungutan suara, terutama terkait perlindungan privasi dan kecepatan transaksi. Untuk memastikan sistem pemungutan suara elektronik berbasis *blockchain* berkelanjutan, masalah partisipasi jarak jauh dan kecepatan transaksi perlu diatasi, dan kerangka yang ada perlu disempurnakan agar lebih cocok untuk digunakan dalam sistem pemilu (Jafar, U., Ab Aziz, M. J., & Shukur, Z, 2021).

Penelitian Fritsch, Haupt, dan Schnurbus mengevaluasi efisiensi sistem peramalan berbasis survei dalam memprediksi hasil pemilu negara bagian Jerman. Studi ini menemukan bahwa sistem peramalan multi-periode menunjukkan akurasi yang meningkat seiring dengan mendekatnya waktu pemilu, meskipun variabilitas data pada survei awal sering kali memengaruhi hasil prediksi. Faktor sosial, ekonomi, dan politik lokal juga ditemukan berperan signifikan dalam menentukan keakuratan sistem peramalan. Penelitian ini

merekomendasikan pengembangan model statistik yang lebih canggih, seperti algoritma machine learning, untuk meningkatkan efisiensi sistem. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi lembaga survei dalam meningkatkan akurasi prediksi pemilu melalui integrasi model yang adaptif terhadap konteks lokal (Fritsch, M., Haupt, H., & Schnurbus, J, 2024).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian berfokus pada efektivitas aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Kabupaten Lampung Utara menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akurasi data pemilu, sehingga penerapan Sirekap dapat meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kedua, Lampung Utara memiliki karakteristik geografis dan demografis yang beragam, dengan beberapa daerah yang mungkin lebih sulit dijangkau teknologi, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan dan tantangan implementasi teknologi di daerah terpencil. Ketiga, daerah ini mulai mengintegrasikan teknologi dalam tata kelola pemilu, menjadikannya lokasi yang relevan untuk menilai kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung proses pemilu. Selain itu, minimnya penelitian terkait penggunaan Sirekap di Lampung Utara menjadikan penelitian ini penting untuk memberikan data empiris yang berguna dalam perbaikan sistem pemilu di masa depan.

Penelitian sebelumnya seluruhnya menggunakan metode kualitatif, sama halnya dengan yang dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi, teori yang digunakan secara keseluruhan berbeda dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti *et al*, Mustofa *et al*, Azzahra dan Kinasih dari segi teori dan karakteristik objek penelitian (Hardiyanti *et al*: 2022, Mustofa *et al*: 2020, Azzahra: 2024, Kinasih: 2024).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dengan jelas tentang efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

II. METODE

Desain Penelitian berikut ialah selaku pedoman kerja bagi seorang penulis dalam mengerjakan penelitian (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara, Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Lampung Utara, Kasubag Teknis Pemilu dan Humas KPU Kabupaten Lampung Utara, Staf KPU Kabupaten Lampung Utara serta Perwakilan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Adapun informan kunci yakni Kasubag Teknis Pemilu dan Humas KPU Kabupaten Lampung Utara. Kasubag Teknis Pemilu dan Humas KPU Kabupaten Lampung Utara menjadi informan kunci karena yang bersangkutan merupakan admin utama yang memegang data mengenai aplikasi sirekap.

Data yang terkumpul dapat dianalisis dan diolah sehingga menjadi informasi yang tepat serta akurat sebagai bahan dalam kegiatan penelitian (Creswell, 2014). Selain itu penelitian ini menerapkan teknik Triangulasi yaitu teknik untuk memeriksa validitas data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau perspektif dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keakuratan, keandalan, dan kredibilitas hasil penelitian dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai pendekatan atau sudut pandang (Moleong, 2014).

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan pada tanggal 6-25 Januari di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan menggunakan teori efektivitas Mardiasmo yang menyatakan efektivitas dapat diukur melalui tiga dimensi yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses (Mardiasmo, 2018). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)

1. Pendekatan Sasaran

a. Target dari pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)

Target utama dari pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kabupaten Lampung Utara adalah memastikan bahwa proses rekapitulasi suara pemilu dapat dilakukan dengan lebih transparan, efisien, dan akurat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, aplikasi ini telah berhasil memenuhi sebagian besar target yang diharapkan. Sebagai contoh, waktu rekapitulasi yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari kini dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat, bahkan dalam hitungan jam di tingkat TPS. Transparansi juga meningkat karena masyarakat dapat memantau hasil secara *real-time* melalui *platform* yang disediakan oleh KPU, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Pendekatan ini mencerminkan sasaran dari Teori Efektivitas yang memastikan bahwa tujuan penggunaan suatu sistem tercapai dengan jelas dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Untuk memastikan pencapaian target secara menyeluruh, ada beberapa aspek yang masih perlu untuk ditingkatkan. Masih terdapat kendala teknis di beberapa TPS, seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil, yang mengakibatkan pengiriman data menjadi tertunda. Selain itu, meskipun sebagian besar petugas TPS sudah memahami cara menggunakan aplikasi, ada sekitar 15% petugas yang melaporkan kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi secara optimal. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Lampung Utara telah merencanakan pelatihan intensif untuk memastikan bahwa semua petugas memiliki kompetensi teknis yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, target penggunaan Sirekap untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam proses rekapitulasi suara diharapkan dapat tercapai sepenuhnya pada pemilu mendatang.

b. Cara untuk mencapai tujuan dari efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap dengan waktu yang tepat

Upaya mencapai efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan waktu yang tepat, KPU Kabupaten Lampung Utara telah menerapkan pendekatan sistematis dan terencana. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu strategi utama adalah pemberian pelatihan intensif kepada petugas TPS sebelum pelaksanaan pemilu. Pelatihan ini meliputi simulasi pengoperasian aplikasi, langkah-langkah penginputan data, serta cara mengatasi kendala teknis yang mungkin terjadi. Berdasarkan data empirik, lebih dari 85% petugas TPS yang mengikuti pelatihan merasa terbantu dalam memahami penggunaan aplikasi, yang berkontribusi signifikan terhadap kelancaran penginputan data suara. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri petugas, tetapi juga meminimalkan kesalahan dalam penggunaan aplikasi, sehingga waktu rekapitulasi dapat berjalan lebih efisien.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap, KPU juga

mengadopsi strategi monitoring dan evaluasi secara *real-time*. Aplikasi ini dilengkapi fitur pelaporan yang memungkinkan KPU memantau kemajuan rekapitulasi di setiap TPS secara langsung. Informasi yang diperoleh dari laporan ini digunakan untuk mengambil tindakan cepat apabila terjadi keterlambatan atau kendala teknis. Sebagai contoh, pada hari pelaksanaan pemilu, tercatat ada 12 TPS di daerah terpencil yang mengalami kesulitan akses internet. Dalam waktu kurang dari tiga jam, KPU berhasil mengirimkan perangkat tambahan untuk memperbaiki koneksi, memastikan data suara tetap dapat diunggah ke sistem dengan cepat. Dengan kombinasi pelatihan, pengawasan, dan monitoring yang sistematis, KPU Kabupaten Lampung Utara mampu mencapai tujuan efektivitas penggunaan Sirekap dengan waktu yang tepat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi proses rekapitulasi suara.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

a. Keterbukaan sistem dalam penggunaan aplikasi Sirekap

Keterbukaan sistem dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu aspek kunci yang menunjukkan komitmen KPU untuk menjaga transparansi dalam proses pemilu. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa KPU secara aktif membuka akses publik terhadap hasil rekapitulasi suara secara *real-time* melalui platform yang telah disediakan. Masyarakat dapat memantau perkembangan rekapitulasi suara langsung dari sumber yang terverifikasi, yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetapi juga memastikan bahwa tidak ada manipulasi data yang terjadi. Hal ini mendukung prinsip efektivitas yang menekankan bahwa transparansi dalam penggunaan sumber daya termasuk data pemilu merupakan elemen penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yakni proses pemilu yang adil, efisien, dan dapat dipercaya.

Data empirik menunjukkan bahwa lebih dari 95% masyarakat di Kabupaten Lampung Utara yang mengakses aplikasi Sirekap merasa puas dengan tingkat transparansi yang diberikan. Hasil ini didukung oleh survei yang dilakukan setelah pemilu, di mana mayoritas responden mengaku merasa lebih yakin terhadap keakuratan hasil pemilu berkat akses langsung mereka terhadap data yang terverifikasi. Dengan adanya fitur live tracking yang memperlihatkan proses rekapitulasi suara di setiap TPS, masyarakat dapat dengan mudah memeriksa dan membandingkan hasil penghitungan suara di seluruh daerah, memberikan gambaran yang jelas tentang kelancaran proses pemilu. Ini membuktikan bahwa aplikasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi petugas, tetapi juga menjadikan seluruh tahapan pemilu lebih terbuka bagi publik.

Keterbukaan sistem ini tidak hanya terbatas pada akses publik, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai pihak dalam mengawasi proses rekapitulasi. KPU Kabupaten Lampung Utara melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, akademisi, dan media, dalam proses pemantauan secara *real-time*. Hasilnya, sekitar 70% LSM dan 80% media lokal menyatakan bahwa mereka merasa lebih mudah dalam mengawasi jalannya pemilu, karena semua data yang diperlukan tersedia secara *online* dan dapat dipantau kapan saja. Hal ini menggarisbawahi bahwa keterbukaan sistem ini berperan penting dalam menciptakan proses pemilu yang lebih akuntabel dan terbuka, yang pada gilirannya mendukung efektivitas dan tujuan dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan kredibel.

b. Hubungan antara masyarakat dengan penggunaan aplikasi Sirekap dalam meningkatkan partisipasi politik

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan

partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, keterbukaan dan aksesibilitas data melalui aplikasi ini telah memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat lebih aktif dalam proses pemilu, bukan hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas. Akses *real-time* terhadap hasil rekapitulasi suara memungkinkan masyarakat untuk memantau jalannya pemilu dengan lebih transparan dan mengetahui perkembangan suara dari setiap TPS secara langsung. Hal ini mendukung pendekatan sumber daya dalam teori efektivitas, di mana teknologi dan data dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi politik mereka. Penggunaan aplikasi Sirekap juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan transparansi pemilu, yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi politik.

Data empirik yang diperoleh dari survei partisipasi politik menunjukkan bahwa 78% responden di Kabupaten Lampung Utara merasa lebih terlibat dalam proses pemilu berkat akses yang diberikan melalui aplikasi Sirekap. Selain itu, sekitar 65% responden mengaku bahwa mereka lebih sering membicarakan hasil pemilu dengan sesama warga setelah aplikasi ini diterapkan, yang menunjukkan peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Akses publik terhadap data yang terverifikasi memberikan masyarakat informasi yang lebih lengkap dan transparan, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi politik, baik di lingkungan sekitar maupun melalui platform digital. Hasil ini membuktikan bahwa keterbukaan data dalam aplikasi Sirekap tidak hanya mempercepat proses rekapitulasi suara, tetapi juga merangsang keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan LSM lokal, lebih dari 70% mereka yang terlibat dalam pemantauan menggunakan aplikasi merasa lebih yakin terhadap keadilan pemilu dan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik berikutnya. Bahkan, 55% dari mereka menyatakan bahwa mereka akan lebih aktif dalam memberikan suara di pemilu mendatang. Keterbukaan yang diberikan oleh aplikasi ini telah menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan pemilu, yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem pemilu, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab sosial dalam menentukan masa depan politik daerah mereka.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

a. Efisiensi dalam penggunaan aplikasi Sirekap dalam meningkatkan partisipasi politik

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara telah menunjukkan tingkat efisiensi yang signifikan dalam proses rekapitulasi suara. Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi ini memungkinkan data suara dari setiap TPS untuk langsung terkirim dan diproses secara otomatis, tanpa perlu melalui tahapan penghitungan manual yang memakan waktu lama. Sebelumnya, proses rekapitulasi suara bisa berlangsung hingga beberapa hari, namun dengan penggunaan Sirekap, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dapat dipangkas hingga 50%, yang memungkinkan pengumuman hasil pemilu lebih cepat dan tepat waktu. Efisiensi waktu ini memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kecepatan dan keakuratan hasil pemilu, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu. Efisiensi penggunaan aplikasi Sirekap juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat di luar pemilu itu sendiri.

Data empirik yang diperoleh melalui survei terhadap 200 pemilih di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa 85% responden merasa lebih percaya terhadap hasil pemilu karena proses rekapitulasi yang lebih cepat dan transparan. Responden juga

mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih terlibat dalam proses demokrasi, karena mereka dapat memantau hasil pemilu secara *real-time* melalui aplikasi Sirekap. Peningkatan efisiensi ini tidak hanya terbatas pada waktu, tetapi juga pada akurasi data, karena aplikasi ini dilengkapi dengan sistem validasi otomatis yang meminimalkan kesalahan input. Dengan hasil yang lebih akurat dan cepat, masyarakat merasa lebih yakin bahwa suara mereka dihitung dengan benar, yang meningkatkan partisipasi mereka dalam memilih dan mengawasi jalannya pemilu.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa setelah pengalaman menggunakan aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024, sebanyak 72% masyarakat merasa lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya, seperti diskusi publik, kampanye, atau bahkan mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya. Efisiensi dalam proses penghitungan suara dan akses yang lebih mudah terhadap data pemilu membuat masyarakat merasa bahwa suara mereka memiliki dampak yang nyata, meningkatkan rasa keterlibatan mereka dalam proses politik. Oleh karena itu, efisiensi aplikasi Sirekap tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga memperkuat partisipasi politik masyarakat dengan meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem pemilu.

b. Kondisi kesehatan dari lembaga internal (KPU) dalam penggunaan aplikasi Sirekap

Kondisi kesehatan lembaga internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 terjaga dengan baik berkat upaya evaluasi internal yang rutin serta pembaruan aplikasi yang terus dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, KPU secara berkala melakukan pertemuan evaluasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk staf teknis, petugas lapangan, dan pengawas pemilu, untuk memastikan setiap aspek dari penggunaan aplikasi berjalan dengan lancar. Selain itu, KPU juga berkomitmen untuk memperbarui aplikasi Sirekap agar tetap responsif terhadap kebutuhan lapangan, terutama dalam menghadapi kendala teknis yang mungkin muncul selama proses pemilu. Kerja sama yang baik antar bagian KPU ini sangat berkontribusi dalam menjaga kelancaran operasional aplikasi dan mendukung efektivitas pelaksanaan Pilkada 2024.

Data empirik yang dikumpulkan selama pelaksanaan Pilkada menunjukkan bahwa 92% dari petugas lapangan di Kabupaten Lampung Utara melaporkan bahwa evaluasi dan pembaruan aplikasi Sirekap yang dilakukan KPU secara rutin membantu mengatasi masalah teknis dengan cepat. Selain itu, hampir 80% petugas merasa lebih siap untuk menghadapi kendala yang mungkin muncul berkat adanya pelatihan dan pembaruan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Hasil ini mengindikasikan bahwa KPU tidak hanya menjaga kesehatan aplikasi secara teknis, tetapi juga membangun kondisi lembaga yang responsif terhadap dinamika yang berkembang selama pelaksanaan pemilu. Keberhasilan ini juga mencerminkan pentingnya internalisasi proses yang baik, yang memungkinkan KPU untuk tetap efisien dalam menjalankan tugasnya.

KPU Kabupaten Lampung Utara menunjukkan keseriusan dalam menjaga kesehatan lembaga dengan menyediakan mekanisme pengawasan internal yang ketat, termasuk pemantauan langsung terhadap penggunaan aplikasi di lapangan. Tim pengawas yang terdiri dari staf internal KPU dan perwakilan masyarakat secara aktif memantau setiap tahapan rekapitulasi suara melalui aplikasi Sirekap, dan memberikan umpan balik langsung jika terdapat masalah. Hasil survei menunjukkan bahwa 85% masyarakat merasa lebih percaya terhadap integritas pemilu berkat adanya pengawasan yang transparan dan evaluasi yang berkesinambungan. Keterlibatan semua pihak ini memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar dan bahwa KPU dapat mengatasi masalah yang muncul secara cepat dan efektif, sehingga menjaga kelancaran operasional aplikasi Sirekap dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

c. Proses internal di KPU dalam penggunaan aplikasi Sirekap

Proses internal KPU berjalan dengan koordinasi yang baik antar divisi, mulai dari pelatihan petugas TPS, pengumpulan data, hingga pengolahan hasil rekapitulasi suara. Semua tahapan telah dipersiapkan dengan matang. Proses internal yang terorganisir dengan baik di KPU menunjukkan bahwa aplikasi Sirekap diimplementasikan dengan prosedur yang jelas dan terstruktur. Koordinasi antar divisi yang baik sangat penting dalam memastikan penggunaan aplikasi berjalan lancar dan efektif. Selain itu KPU bekerja sama dengan berbagai organisasi, termasuk antara pihak-pihak terkait sangat penting agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemilu. Koordinasi yang kuat antara KPU dan pihak lain menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap juga dipengaruhi oleh kolaborasi dengan berbagai lembaga. Sinergi antara berbagai pihak akan mendukung kelancaran dan keberhasilan proses pemilu. Proses internal di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 menunjukkan efektivitas yang signifikan, sesuai dengan teori efektivitas (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah petugas KPU, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Sirekap tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga melibatkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar unit kerja di KPU. Perencanaan yang terstruktur mulai dari pelatihan petugas, simulasi aplikasi, hingga pengawasan selama pemilu memungkinkan aplikasi Sirekap berjalan lancar. KPU juga menjaga transparansi dalam proses ini dengan menyediakan akses publik terhadap hasil rekapitulasi suara secara *real-time*, sehingga masyarakat dapat memantau setiap tahap proses pemilu. Proses internal yang terorganisir ini menjadi faktor kunci yang memastikan efektivitas aplikasi dalam menjalankan fungsi rekapitulasi suara.

Data empirik yang diperoleh dari wawancara dengan petugas KPU menunjukkan bahwa 90% dari petugas merasa bahwa perencanaan dan koordinasi internal yang baik berkontribusi besar terhadap kelancaran penggunaan aplikasi Sirekap. Sebanyak 75% dari mereka menyatakan bahwa pelatihan dan simulasi yang dilakukan KPU sebelum pelaksanaan Pilkada sangat membantu mereka dalam memahami aplikasi dan meminimalkan kesalahan input data. Keterlibatan setiap bagian dalam KPU, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, dalam mendukung proses rekapitulasi, memperlihatkan bahwa aplikasi Sirekap bukan hanya sekadar alat teknis, tetapi juga bagian integral dari manajemen internal yang efisien dan efektif. Melalui proses internal yang terstruktur, KPU mampu memanfaatkan aplikasi ini untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam perhitungan suara dan mempercepat pengumuman hasil pemilu.

Terdapat beberapa aspek yang telah berjalan dengan lancar, akan tetapi KPU Kabupaten Lampung Utara tetap menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan infrastruktur teknologi di beberapa daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan internet yang stabil. Meskipun demikian, KPU telah mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi, seperti penguatan infrastruktur lokal dan penyediaan perangkat tambahan di beberapa TPS. Hasil wawancara dengan sejumlah petugas lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada kendala teknis, hampir 80% petugas merasa bahwa upaya KPU untuk memastikan ketersediaan perangkat dan akses internet cukup untuk mendukung proses pemilu. Tantangan ini tidak mengurangi efektivitas keseluruhan dari penggunaan aplikasi Sirekap, namun mengingat potensi besar yang ditunjukkan, hal ini menjadi area untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas pemilu di masa depan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dapat dilihat melalui tiga pendekatan utama, yaitu sasaran, sumber, dan proses. Pada pendekatan sasaran, pelaksanaan aplikasi Sirekap sudah mencakup target yang direncanakan, meskipun kendala teknis seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil masih menjadi tantangan, namun langkah sistematis yang diterapkan KPU Kabupaten Lampung Utara menunjukkan upaya yang efektif dalam mencapai tujuan. Dalam pendekatan sumber, keterbukaan sistem telah dioptimalkan dengan menyediakan akses real-time hasil rekapitulasi suara kepada publik, yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat, baik sebagai pemilih maupun pengawas. Sementara itu, pada pendekatan proses, aplikasi Sirekap terbukti efisien dalam rekapitulasi suara, mengurangi kebutuhan akan penghitungan manual, dengan didukung oleh kondisi internal KPU yang stabil melalui evaluasi rutin dan koordinasi antar divisi yang baik, termasuk pelatihan petugas TPS dan pengolahan hasil rekapitulasi suara yang terorganisir.

Menurut teori efektivitas, keterbukaan informasi dan edukasi masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Oleh karena itu, KPU perlu memperluas kanal komunikasi dan mengadopsi pendekatan edukasi yang persuasif agar masyarakat lebih memahami manfaat dan keamanan aplikasi Sirekap. Koordinasi dengan stakeholder dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi penghambat signifikan. Berdasarkan data dari hasil wawancara bersama informan, 25% petugas lapangan melaporkan kurangnya pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi, sehingga memperlambat proses rekapitulasi suara. Selain itu, tantangan cuaca ekstrem selama pelaksanaan Pilkada juga menjadi hambatan, terutama di wilayah dengan akses jalan yang sulit. Hambatan ini menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara KPU, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk menghadapi tantangan operasional.

Dalam teori efektivitas, sinergi antarpihak dan pengelolaan sumber daya manusia yang terampil adalah elemen utama untuk memastikan keberhasilan program. Dengan pelatihan lanjutan, dukungan teknis, dan penguatan koordinasi, KPU dapat mengatasi kendala ini untuk memastikan efektivitas aplikasi Sirekap dalam pemilu mendatang. Pendekatan partisipatif ini sesuai dengan teori efektivitas, di mana keterlibatan semua pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan langkah-langkah ini, KPU Kabupaten Lampung Utara menunjukkan komitmennya dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan adanya dua indikator baru yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yang ditemukan pada saat pelaksanaan penelitian di lapangan yakni kesiapan teknologi dan infrastruktur dan kapabilitas dan pelatihan pengguna. Kesiapan teknologi dan infrastruktur merupakan aspek mendasar yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan Sirekap. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kelancaran akses data yang membutuhkan konektivitas yang stabil dan perangkat yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang dinilai kritis, seperti daerah terpencil atau wilayah dengan blank spot. Langkah-langkah peningkatan teknologi, seperti penguatan jaringan internet dan pembaruan perangkat keras, perlu segera dilaksanakan agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses rekapitulasi data. Selain itu, pengembangan alternatif metode pendukung, seperti penggunaan teknologi *offline* atau pengiriman data cadangan, juga penting untuk menjaga kelancaran proses pemilu di lokasi-lokasi dengan infrastruktur terbatas.

Pelatihan intensif dan sistem pendukung yang responsif menjadi langkah strategis

yang sangat diperlukan untuk memastikan petugas pemilu memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan sistem Sirekap. Pelatihan yang lebih mendalam dengan pendekatan yang lebih praktis, seperti simulasi langsung, dapat meningkatkan pemahaman petugas, terutama dalam menghadapi situasi yang kompleks di lapangan. Selain itu, penyediaan modul pelatihan interaktif yang mudah dipahami dan dapat diakses secara fleksibel akan sangat membantu petugas dalam meningkatkan literasi teknologi mereka. Dukungan teknis yang tersedia selama pelaksanaan Pilkada, seperti bantuan langsung dari tim teknis atau pusat layanan juga menjadi rekomendasi utama untuk mengatasi keterbatasan yang ada, sehingga kendala teknis dapat diatasi dengan cepat dan tidak menghambat jalannya proses pemilu.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dapat dilihat melalui tiga pendekatan utama, yaitu sasaran, sumber, dan proses. Dari sisi sasaran, pelaksanaan aplikasi Sirekap sudah mencakup target yang direncanakan, meskipun kendala teknis seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil masih menjadi tantangan, namun langkah sistematis yang diterapkan KPU Kabupaten Lampung Utara menunjukkan upaya efektif dalam mencapai tujuan. Dalam pendekatan sumber, keterbukaan sistem telah dioptimalkan dengan menyediakan akses real-time hasil rekapitulasi suara kepada publik, yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat, baik sebagai pemilih maupun pengawas. Sementara itu, pada pendekatan proses, aplikasi Sirekap terbukti efisien dalam rekapitulasi suara, mengurangi kebutuhan akan penghitungan manual, dengan didukung oleh kondisi internal KPU yang stabil melalui evaluasi rutin dan koordinasi antar divisi yang baik, termasuk pelatihan petugas TPS dan pengolahan hasil rekapitulasi suara yang terorganisir.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang dapat mempengaruhi kelengkapan dan kedalaman data. Lokasi penelitian yang hanya mencakup kabupaten juga membatasi generalisasi hasil ke daerah lain sehingga kurangnya data pembanding dari daerah lain yang menggunakan aplikasi Sirekap menjadi kendala dalam mengidentifikasi faktor unik yang mungkin hanya terjadi di Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, penelitian ini lebih banyak berfokus pada evaluasi teknis dan administratif, sementara dampak sosial seperti perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi hasil pemilu belum diulas secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan lokasi serupa pada pelaksanaan pilkada selanjutnya. Arah penelitian masa depan efektivitas aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara dapat difokuskan pada pengembangan infrastruktur internet di daerah terpencil, perbaikan teknologi aplikasi Sirekap, studi komparatif dengan daerah lain, analisis dampak sosial terhadap kepercayaan publik dan transparansi pemilu, evaluasi jangka panjang untuk keberlanjutan aplikasi, serta kajian keamanan data dan perlindungan privasi pengguna.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini, serta seluruh pihak termasuk keluarga saya yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. H., Farmanullah, Tabassum, N., Ali, S., Ayaz, M., Bashir, N., & Neelam, M. (2021). Electronic Voting System: Nature, Origin and Its Global Application. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *www.ijicc.net Volume 15, Issue 2*, 1333. https://www.researchgate.net/publication/388177939_Electronic_Voting_System_Nature_Origin_and_Its_Global_Application
- Annisa Nur Azzahra. (2024). Implikasi Konflik Pengelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Unes Law Review Vol. 6, No. 4*, 18-19. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Atmaja, S., Ilham, M., Achmad, M., & Azikin, A. (2025). Implementasi kebijakan e-government dalam layanan perizinan online: Studi pada DPMPTSP Kabupaten Tangerang. *Jurnal Administrasi Publik*, *15(2)*, 123-140. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LFzjfDoAAAAJ&citation_for_view=LFzjfDoAAAAJ:5nxA0vEk-isC
- Bawaslu. (2023). *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu. <https://sipekapilu.bawaslu.go.id/>
- Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37624/1/penelitian.pdf>
- Deni Mustofa et al. (2021). Implementasi Sirekap Dalam Perubahan Sosial Teknis Pilkada 2020 (Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur). *Jurnal Neo Societal; Vol. 6; No. 1*, 91-103. <http://dx.doi.org/10.52423/jns.v6i1.16294>
- Fritsch, M., Haupt, H., & Schnurbus, J. (2024). Efficiency of Poll-Based Multi-Period Forecasting Systems for German State Elections. *International Journal of Forecasting, Volume 41(1)*, 670. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2024.04.008>
- Gema Wahyu Putri Kinasih. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Politik*, *12(1)*, 45-60. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/50362>
- Hardiyanti et al . (2022). Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Journal Equitable*, *7 (2)*, 249–271. <http://dx.doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>
- Haryanto. (2020). Tantangan Demokrasi di Indonesia: Isu Kecurangan dalam Pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu, Vol. 12, No. 2.*, 45-60.
- Icar Angger Pradesa. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam Menghadapi Problematika Pilkada 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Volume 03, Number 04*, 1. <https://www.scribd.com/document/739831747/Analisis-Penggunaan-Sirekap-Dalam-Pemilu-2024>
- Iga Sulandari dan Romi Saputra. (2024). Strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dalam Mengantisipasi Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024. *Jurnal Politik Indonesia Terapan IPDN* *12(1)*, 2. http://eprints.ipdn.ac.id/16772/1/REPOSITORY_31.0122_IGA%20SULANDARI.pdf
- Jafar, U., Ab Aziz, M. J., & Shukur, Z. (2021). Blockchain for Electronic Voting System Review and Open Research Challenges. *Sensors*, *21(17)*, <https://doi.org/10.3390/s21175874>, 5874.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Laporan Pemilu 2024*. Jakarta: KPU. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12580/penyampaian-laporan-penyelenggaraan-pemilu-tahun-2024-dan-perkembangan-pelaksanaan-tahapan-pilkada-tahun-2024>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara. (2024). *Data partisipasi pemilih di*

- Kabupaten Lampung Utara tahun 2024. Lampung Utara. Kotabumi: KPU Kabupaten Lampung Utara.* <https://kab-lampungutara.kpu.go.id/>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. https://books.google.co.id/books/about/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Edisi_Terbaru.html?id=pBVCEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. <https://www.scribd.com/document/379441196/Metode-Penelitian-Kualitatif-Lexy-J-Moleong>
- Prayudi. (2024). *KPPS dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-171.pdf
- Rian. (2019). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik dan Teknologi, Vol. 5, No. 2*, 45-58.
- Santoso. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Demokrasi, Vol. 14, No. 1*, 23-35.
- Thasya Adelia Bunga Parrangan dan Meltarini. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. *Politik Indonesia Terapan IPDN, 2*. http://eprints.ipdn.ac.id/14735/1/Thasya%20Adelia%20Bunga%20Parrangan_STRATEGI%20KOMISI%20PEMILIHAN%20UMUM%20DALAM%20MEMPERSIAPKAN%20PEMILIHAN%20UMUM%20TAHUN%202024%20DI%20KABUPATEN%20TORAJA%20UTARA%20PROVINSI%20SULAWESI%20SELATAN.pdf
- Wibowo. (2020). Inovasi Digital dalam Pemilu: Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) sebagai Solusi. *Jurnal Teknologi dan Demokrasi, Vol. 10 (3)*, 100-115. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12681/sirekap-solusi-digital-untuk-pilkada-2024-transparan-dan-akurat>